

Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia

June Kuncoro Hadiningrat

Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri
Pusdiklat Kemenlu Republik Indonesia
e-mail: Junkuncorohadi@gmail.com

Received: 12-03-2020,

Accepted: 17-04-2020

Abstrak

Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastruktur pelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum.

Kata Kunci: diplomasi kelautan, diplomasi maritim, poros maritim dunia

Abstract

Maritime diplomacy is an integral part of Indonesian diplomacy. The foundation of Indonesia's maritime diplomacy has been carried out seriously. Subsequently designed steps to achieve improved performance of marine diplomacy to contribute to the continued foundation for the World Maritime Fulcrum. In the medium term, the quality of maritime diplomacy needs to be strengthened and further devoted to creating a stronger maritime regime. Maritime diplomacy also needs to be strengthened with a business spirit, so that it can contribute to inviting investors and experts to develop Indonesian connectivity, port infrastructure and shipping business in general.

Keywords: maritime diplomacy, global maritime fulcrum, maritime regime

Pendahuluan.

Diplomasi maritim Indonesia secara historis merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Isu maritim sejatinya sudah sejak lama menjadi perhatian dan perjuangan diplomasi Indonesia¹. Diakuinya konsepsi Negara Kepulauan Indonesia secara internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*

1982) merupakan contoh keberhasilan diplomasi maritim Indonesia yang monumental. Hal ini menggambarkan gigihnya perjuangan panjang diplomasi maritim Indonesia selama 25 tahun sejak dikeluarkan Deklarasi Juanda tahun 1957 (B. Mauna, 2000: vii).

Berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pada masa administrasi Presiden Joko Widodo (2014-

¹ Pada tahun 1960-1970 dihasilkan 12 Perjanjian Indonesia dengan Negara Tetangga untuk rezim laut teritorial dan landas kontinen. Diplomasi di periode ini diarahkan untuk sinkronisasi konsep negara

kepulauan dengan perjanjian batas negara yang mengakomodir kepentingan negara tetangga agar konsep wilayah nusantara Indonesia mendapat dukungan

2019) aspek kelautan/maritim dalam diplomasi Indonesia diberikan aksentuasi. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya visi “Poros Maritim Dunia” (*global maritime fulcrum/GMF*) dan – kemudian—diluncurkan “Buku Putih Pembangunan Kelautan” (dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres 16 tahun 2017) yang berfungsi sebagai rujukan diplomasi maritim Indonesia. Gagasan Poros Maritim Dunia Indonesia ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur ke-9, pada tahun 2014 di Napyidaw, Myanmar.

Pengkhususan diplomasi maritim ini memiliki implikasi yang luas bagi kebijakan dan pembangunan kelautan. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman dan investasi) melalui Peraturan Presiden Nomor. 10 Tahun 2015, merupakan salah satu wujud konkret keseriusan pembangunan di matra ini. Demikian pula pelaksanaan diplomasi, yang selama ini secara umum disebut diplomasi politik dan ekonomi, menjadi secara khusus disebut “diplomasi maritim” dengan parameter capaian yang lebih jelas sebagaimana termaktub dalam Perpres 16 tahun 2017.

Dengan adanya doktrin dan pembentukan instansi utama yang menanganinya, diplomasi maritim menjadi lebih terarah. Kemenko Kemaritiman dan Investasi berperan sebagai koordinator pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia (Lampiran

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017: 6.3). Terkait diplomasi maritim, Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai penjuror atau koordinator. Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut menggariskan bahwa diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017: 5.7).

Penelitian ini berupaya melihat capaian diplomasi maritim Indonesia dalam periode 2014-2019 di tengah tingginya *euphoria* kembali ke lautan. Peneliti menggunakan tujuh program prioritas diplomasi maritim Indonesia sebagai parameter menilai capaian tersebut. Dalam menelaah capaian diplomasi maritim, selain penilaian terhadap data yang ada, juga di rujuk sejumlah analisis dan penilaian peneliti lainnya sebagai data pelengkap. Secara umum, capaian diplomasi maritim belum sepenuhnya merealisasikan program-program utama, namun perlu mendapat apresiasi karena dapat berfungsi sebagai peletak awal fondasi untuk mencapai cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia di masa mendatang.

Parameter

Secara geografis, Indonesia terletak di posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara episentrum wilayah pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik dan wilayah kaya sumber

alam Timur Tengah dan Afrika. Saat yang bersamaan juga terjadi perubahan sentra geopolitik dan geoekonomi dari Trans Atlantik ke kawasan Indo-Pasifik di mana posisi Indonesia berada di tengah Kawasan Indo-Pasifik tersebut. Posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai perlintasan kegiatan pelayaran kapal sipil maupun militer yang menuntut pengaturan dan pengawasan tersendiri saat melintas (*freedom of navigation*).

Luas wilayah laut Indonesia yang mencakup 5,8 juta km² dan dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia yaitu 95.131 km merupakan potensi kelautan yang kaya. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 dan potensi sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah menjadi suatu tuntutan bahwa pembangunan kelautan menjadi penting, khususnya untuk Indonesia mencapai Poros Maritim Dunia (Evan Laksamana dkk-CSIS, 2018).

Secara alamiah, pembangunan bidang kelautan akan terkait interaksi dengan negara lain (negara tetangga) misalnya menyangkut sengketa perbatasan laut, *illegal fishing*, perompakan, penyeludupan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan *joint exploration, multi-stake claim* atas aset yang belum diatur dan sebagainya. Selain itu, negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki kewajiban untuk memberikan laluan bagi kapal/pihak asing dengan mengatur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) seraya melindungi

kedaulatan dan kekayaan lautnya. Oleh karena itu, diplomasi maritim memiliki tanggung jawab untuk meluaskan kerja sama internasional untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia.

Pembangunan kelautan dan diplomasi terkait maritim (*maritime domain*) selalu ada dalam nafas kegiatan diplomasi Indonesia. Dalam masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yoedhoyono, geliat diplomasi Indonesia selalu memperjuangkan substansi kelautan. Diplomasi maritim tergambar dalam bentuk partisipasi pada perundingan internasional di berbagai organisasi internasional, perundingan terkait perbatasan dengan negara lain, maupun penanganan *dispute* yang terjadi di laut teritorial Indonesia atau laut internasional terkait dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim.

Pada masa sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, perundingan batas wilayah (termasuk batas laut --walaupun lebih banyak tentang batas darat), dimasukkan dalam nomenklatur diplomasi perbatasan (*border diplomacy*). Perjuangan kepentingan nasional Indonesia tentang isu kelautan, dimasukkan dalam kategori diplomasi politik karena menyangkut hukum internasional maupun resolusi konflik atau dimasukan dalam diplomasi ekonomi karena menyangkut pembangunan dan kerja sama eksplorasi sumber alam, pencemaran lingkungan dan

sebagainya. Dengan kekayaan laut yang berlimpah dan begitu banyak kepentingan nasional dalam urusan kelautan, maka mau tidak mau perhatian pada diplomasi maritim harus ditingkatkan, dalam bentuk diplomasi yang lebih khusus dan dengan doktrin yang lebih spesifik. Selama ini, aspek maritim belum sepenuhnya diposisikan sebagai fokus utama diplomasi (Najamudin Khairul Rijal, 2013: 63-78).

Diplomasi Maritim Indonesia didasari atas doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) atau *Global Maritime Fulcrum* (GMF). Menurut Rizal Sukma, PMD dapat dilihat dalam tiga konteks (R. Sukma, 2015):

- a. Sebagai visi, yaitu suatu gagasan ideal untuk Indonesia yang akan kita bangun. Suatu panggilan nasional untuk kembali ke identitas asli Indonesia, yaitu bangsa nusantara dan bangsa bahari atau maritim agar dapat membangun Indonesia sebagai bangsa bahari yang ditandai dengan persatuan, kesejahteraan, dan kehormatan.
- b. Sebagai doktrin, yaitu memberikan arah, satu perasaan bersama dan kesatuan tindakan. Secara gamblang, Presiden Joko Widodo menyebut doktrin ini sebagai "*Global Maritime Fulcrum, A Power Between Two Oceans*". Doktrin ini menekankan realitas geografis, geopolitik, dan geoekonomi di mana masa depan Indonesia akan tergantung dan berpengaruh pada dinamika di Samudra India dan Samudra Pasifik.

c. Sebagai seperangkat agenda pembangunan yang memberikan serangkaian agenda konkret yang akan dilakukan pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Misalnya, konektivitas antar pulau, keahlian membuat kapal dan memperbaikinya, industri perikanan, transportasi laut, dan keamanan maritim.

Dalam PMD terdapat lima elemen penting yaitu budaya maritim, infrastruktur maritim, sumber daya alam kelautan, diplomasi maritim serta keselamatan dan pertahanan maritim. Diplomasi maritim merupakan salah satu cara untuk mencapai dan mendukung pencapaian PMD. Sementara itu, sesuai Pilar 5.7 Perpres 16 tahun 2017, diplomasi maritim dibatasi sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, melalui program antara lain percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen dengan hukum internasional.

Sementara itu, dalam diplomasi maritim terdapat tujuh program utama, yaitu:

- a. peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b. peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;

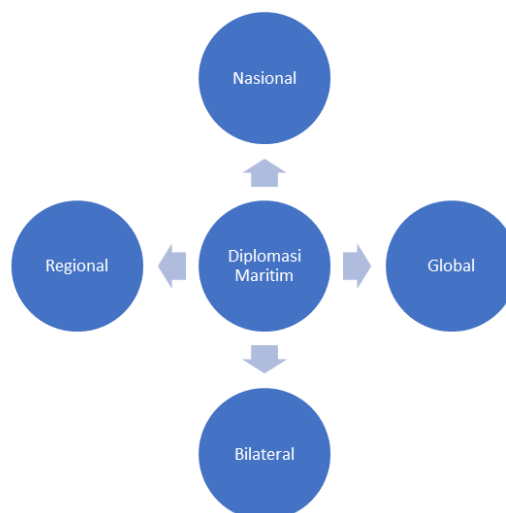
- c. kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. pembakuan nama pulau.

Berdasarkan tujuh program prioritas diplomasi maritim, maka tulisan ini akan melihat refleksi capaian diplomasi Indonesia pada periode 2014-2019. Analisis capaian diplomasi maritim akan difokuskan pada keberhasilan/kegagalan mencapai tujuh program tersebut.

Ditinjau dari *platform* aktivitas atau *playing-ground* diplomasi maritim, maka diplomasi maritim kita dapat dilihat sebagai kegiatan

diplomasi multi-format sebagaimana tergambar di bawah ini:

Diplomasi maritim pada hakikatnya dilakukan pada berbagai ranah diplomasi: bilateral, regional, global, dan nasional (*lihat gambar 1*) dengan bentuk kegiatan diplomasi dan strategi yang berbeda-beda. Fokus pertama diplomasi maritim adalah diplomasi pada ranah regional, di mana Indonesia secara serentak melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan negara anggota kerja sama/organisasi regional misalnya pada ASEAN, IORA, EAS, Indo-Pacific. Kesepakatan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk diplomasi/kerja sama bilateral, misalnya dalam hal perundingan perbatasan dengan 10 negara yang memiliki batas langsung dengan Indonesia. Selain menyusun kesepakatan, kerangka kawasan juga berperan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di kawasan, sehingga inisiatif kawasan berperan strategis (UNCLOS 1982).



Gambar 1. Diplomasi Maritim dilihat dari ranah diplomasinya

Asia Tenggara merupakan kawasan paling menantang untuk diplomasi maritim. Di kawasan ini terdapat sejumlah batas laut yang belum terselesaikan, dinamika Laut Cina Selatan yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik nyata, penyelundupan manusia, obat terlarang, terorisme, perompakan, kerusakan lingkungan, penangkapan ikan ilegal (*IUU fishing*), perbudakan dan acaman kerusakan lingkungan laut. Dengan situasi ancaman keamanan yang kompleks, kerja sama kawasan merupakan keniscayaan bukan pilihan. Oleh karena itu, selain melalui mekanisme ASEAN dan merujuk pada *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*, maka Indonesia secara aktif melakukan diplomasi maritim khususnya dalam *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dan *Extended ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.¹

Sementara itu, untuk diplomasi di ranah global, diplomasi maritim diarahkan pada perundingan untuk menetapkan norma-norma kelautan global dan menegaskan peran aktif serta kepemimpinan Indonesia dalam isu kelautan di tataran global dan organisasi internasional kelautan terkait seperti IMO, ITLOS, ISA, ICAO. Kerja sama kelautan juga dikembangkan melalui organisasi internasional lainnya, seperti PBB dan UNEP. Dalam kerangka global, diplomasi maritim Indonesia juga aktif

berperan dalam isu-isu kelautan global seperti terlibat pada putaran rancangan perjanjian dalam rezim UNCLOS mengenai *Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ)* di PBB, aktif dalam debat perihal *Traffic Separation Scheme (TSS)* di Selat Sunda dan Selat Lombok dalam *Maritime Safety Committee* dalam kerangka IMO, mengupayakan diterimanya Submisi Landas Kontinen Ekstensi Segmen Utara Papua (Euripik Rise) oleh *Commission of the Limits of the Continental Shelf (UN-CLCS)*. (Bebek AKN Djundjuran, 2018). Untuk menegaskan peran Indonesia, diplomasi maritim Indonesia terus berkiprah di organisasi internasional dengan menjadi anggota dalam dalam IMO maupun mencalonkan diri menjadi salah satu hakim di ITLOS.

Pertemuan bilateral Indonesia dengan negara sahabat dalam masalah kelautan juga menjadi cukup penting karena banyak kekhususan dari kerja sama kedua negara termasuk masalah kedalaman dan dengan kerangka kepentingan yang lebih besar. Sejauh ini, kerja sama paling aktif adalah antara Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, dan Indonesia-Thailand mengingat panjangnya perbatasan kedua negara dan tingginya arus lalu lintas kapal di laut kedua negara. Kerja sama kelautan tidak hanya membahas hal-hal umum, namun juga

¹ Saat ini pertemuan AMF telah berlangsung 8 kali (sejak tahun 2010) dan EAMF telah berlangsung 6 kali (sejak tahun 2012 di Manila)

hal teknis yang disepakati mengingat kompleksnya kerja sama bilateral. Kerja sama RI-India misalnya, membahas ZEE demikian juga RI-Vietnam, sementara RI-Filipina saat ini berfokus pada Landas Kontinen, RI-Singapura berfokus pada Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura, dan RI-Australia pada kerja sama memperkuat kapasitas maritim Indonesia (Kompas.com, 2018).

Selain dimensi internasional, diplomasi maritim memiliki dimensi nasional, sehingga yang sangat penting adalah diplomasi dengan pemangku kepentingan nasional. Dengan koordinasi dan konsultasi intensif di dalam negeri, maka dapat disusun posisi bersama pemerintah Indonesia terkait isu kelautan (Tridoyo Kusumastanto, 2010). Dengan kondisi geostrategis Indonesia dan negara tetangga yang berbagi perbatasan laut --misalnya dengan Singapura atau Malaysia-- berpotensi menimbulkan friksi. Untuk itu, mekanisme konsultasi di dalam negeri Indonesia harus solid dan cepat dalam merespons friksi dengan negara tetangga sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menjadi konflik terbuka.

Khusus koordinasi ke dalam, dengan sifat hubungan internasional yang semakin intermestik di mana masalah dalam negeri

dengan cepat menjadi isu luar negeri yang memengaruhi hubungan antarnegara, koordinasi segenap pemangku kepentingan masalah kelautan nasional harus cepat dan memiliki visi yang sama. Dalam kasus penangkapan kapal nelayan asing dan penenggelamannya misalnya, sejatinya adalah masalah domestik Indonesia (dalam hal ini penegakan hukum nasional) yang diketahui negara tetangga (Jakarta Post, 2019). Namun, Vietnam melihat hal ini sebagai pelanggaran kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam². Dengan sistem koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan kelautan, maka isu semacam itu dapat dikelola melalui *hotline* instansi terkait atau jika tidak memungkinkan, melalui jalur diplomatik.

Capaian

Dengan berbagai ranah kegiatan diplomasi dan tujuh program diplomasi maritim yang akan dicapai diplomasi maritim Indonesia di era Presiden Joko Widodo jilid I, kita akan mencoba melihat capaiannya. Banyak hal yang telah dicapai melalui kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan Kementerian Luar Negeri. Satu tahun setelah diplomasi maritim diluncurkan, pada tahun 2016 dari 114 rekomendasi yang disampaikan Kemlu terkait diplomasi maritim, 111 atau 97,37% telah diterima,

² Misalnya peristiwa kapal militer Vietnam yang mencoba menubruk ke kapal TNI AL yang tengah mencoba menangkap kapal berbendera Vietnam.

Tindakan ini diprotes Indonesia karena membahayakan kondisi kapal Indonesia.

sementara itu realisasi jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan maritim, melampaui target yaitu, 300% artinya tiga kali lipat lebih banyak dari yang ditargetkan (Fitriani dan Vido-CSIS, 2019: 17). Pada tahun 2017, jumlah posisi atau rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, politik dan keamanan dari regional dan multilateral yang diterima oleh organisasi internasional sebanyak 342 dari 351 yang diusulkan sehingga mencapai 111,35% (Fitriani dan Vido-CSIS, 2019: 115). Gambaran capaian ini mencerminkan butir 1 dari 7 program utama diplomasi maritime, yaitu peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Capaian Indonesia, yakni berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan perdamaian dunia di bidang kelautan (butir 2 program prioritas), tercermin dalam kiprah Indonesia pada KTT Pertama IORA. Usulan Indonesia perihal menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah Samudra Hindia diterima oleh pertemuan *Council of Minister* sebagai organ tertinggi dalam IORA. Demikian pula diplomasi Indonesia dalam *ASEAN Maritime Forum* (AMF) maupun *Extended ASEAN Maritime Forum* (EAMF) dilakukan terus menerus untuk memastikan terciptanya Kawasan laut yang damai di ASEAN. Hal yang sama juga dilakukan dalam sejumlah forum. Dalam forum ASEAN, diplomasi maritim Indonesia

juga diabdikan untuk kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional. Melalui forum ASEAN, Indonesia menumbuhkan norma-norma regional untuk menghormati kedaulatan negara lain dan mengelola laut menjadi wilayah damai dan sarana eskplorasi untuk kesejahteraan bersama. Melalui forum ASEAN, diplomasi maritim memperkuat *ASEAN Connectivity*. Indonesia melalui PMD mentautkan konektivitas Asia Tenggara sampai ke Asia Tengah dengan *Maritime Silk Road* atau *Belt and Road Initiative* dari Cina.

Dalam konteks Asia Timur, melalui KTT Asia Timur tahun 2018, diplomasi maritim Indonesia aktif mendorong peningkatan kerja sama kelautan di kawasan Indo-Pasifik, yaitu di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan kedua samudra ini sangat strategis, yaitu sebagai jalur perdagangan internasional dan Indonesia berharap wilayah tersebut tetap aman dan damai, tanpa ada perebutan kepentingan dan pertikaian wilayah (Bisnis.com, 2018).

Untuk melindungi kekayaan hayati dan kesejahteraan nelayan, Indonesia memandang perlu mengajak masyarakat internasional untuk memberantas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), antara lain melalui KTT Asia-Eropa ke-11 di Mongolia pada tahun 2016. Indonesia juga aktif melobi negara-negara di ASEAN dalam penanganan *marine plastic debris*. Kepemimpinan atau peran aktif

Indonesia dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan ini juga diperluas pada sejumlah organisasi internasional, termasuk organisasi khusus kemaritiman seperti IMO dan ISA³.

Untuk butir 3 dalam 7 program utama, yaitu kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan, capaian diplomasi maritim Indonesia tercermin dari sejumlah inisiatif perundingan untuk mengarusutamakan norma internasional di kawasan maupun global, seperti penanganan pencemaran minyak di laut karena kebocoran di ASEAN dalam bentuk *ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response* tahun 2014, penanganan ikan ilegal dalam bentuk *ASEAN Guideline for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply of Chain*, menjadi tuan rumah *Our Ocean Conference* (2018), tuan rumah *First High Level Regional Meeting on Marine Environmental Protection of South East Asia Seas (MEPSEAS)* (2018), aktif mengarusutamakan masalah BBNJ (Maritim.go.id, 2019), dan menjadi anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2019-2020.

Keberhasilan nyata dan menjadi prioritas serta *quick win* Kemlu dalam diplomasi maritim adalah diselesaikannya perjanjian internasional dengan negara tetangga, sesuai dengan butir d, pada program prioritas diplomasi maritim, yaitu percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Dalam kurun waktu 5 tahun, 10 perjanjian batas dengan negara-negara tetangga dapat diselesaikan (Ditjen HPI Kemlu, 2019). Tahun 2019, target penyelesaian adalah perjanjian dengan India dan Vietnam untuk ZEE dan dengan Filipina untuk Landas Kontinen.

Lebih jauh lagi, diplomasi maritim Indonesia mengarusutamakan berbagai isu yang menjadi kepentingan Indonesia maupun negara kepulauan lainnya, seperti prioritas butir e, yaitu percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. Upaya ini, tidak saja memerlukan pemahaman yang mendalam tentang isu kelautan dan hukum internasional terkait, namun juga merupakan inisiatif untuk mengamankan potensi kekayaan hayati laut yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Isu ini terus dirundingkan untuk memanfaatkan rezim kelautan yang masih terbuka luas di laut bebas (*high sea*).

³ Menurut data Ditjen Multilateral Kemlu, Indonesia setidaknya menjadi anggota di 10 organisasi internasional terkait kelautan: (1) IMO (*International Maritime Organization*), (2) ISA (*International Seabed Authority*), (3) ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*), (4) NACA (*Network of Aquaculture Centers in Asia and the Pacific*), (5) WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*),

(6) IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), (7) CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), (8) CTI-CFF (*Coral Triangle on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities*). (9) SEAFDEC (*Southeast Asia Fishery Development Centre*), (10) IALA (*International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities*)

Penetapan landas kontinen berperan untuk memastikan kedaulatan wilayah dan perlindungan terhadap kekayaan hayati laut di sekitar Indonesia.

Dari berbagai upaya tersebut, yang nampaknya belum dioptimalkan adalah penempatan WNI di berbagai organisasi internasional bidang kelautan. Isu *underrepresented* di organisasi internasional sebetulnya bukan eksklusif dialami sektor kelautan, di organisasi internasional lainnya bahkan di mana Indonesia sangat aktif, seperti OKI, hampir tidak ada WNI yang bekerja di organisasi internasional. Padahal posisi tersebut sangat strategis untuk menjadi mata dan telinga Indonesia sekaligus meraih manfaat ekonomi karena kontribusi finansial Indonesia kepada organisasi internasional yang cukup besar (Data Setditjen Multilateral 2019) dapat dikembalikan ke WNI.

Untuk itu, memang perlu upaya terstruktur dan masif untuk memenangkan WNI menduduki jabatan di organisasi internasional. Kegagalan penempatan putra terbaik Indonesia pakar hukum internasional dan diplomat ulung (Arif Havas Ugroseno) untuk mengisi dua kursi hakim ITLOS dari kawasan Asia Pasifik (2017-2026) menjadi bahan refleksi strategi terbaik, agar kita dapat menempatkan WNI di organisasi internasional bidang kelautan⁴. Padahal dengan posisi sebagai negara maritim

terbesar, Indonesia seharusnya dapat menjadi pejabat kunci dalam organisasi internasional, sebagai bagian dari upaya Indonesia mewujudkan cita-citanya menjadi Poros Maritim Dunia.

Butir terakhir dari 7 program utama, yaitu Pembakuan nama pulau. (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006). Upaya ini sangat strategis karena dapat menjadi titik tolak bukti kedaulatan wilayah teritori Indonesia yang tidak dapat diklaim negara lain (Republika.com, 2017). Menurut pakar Hukum Internasional, Arif Havas Oegroseno, pendaftaran nama rupa bumi di PBB adalah suatu kegiatan administratif bagi negara-negara anggota PBB dan penamaan bukan berarti suatu bentuk pengakuan kedaulatan PBB atas suatu pulau. (Maritim.go.id, 2017)

Penamaan pulau berimplikasi pada pengaturan rezim kelautan Indonesia dan oleh karena itu, mekanisme penamaan pulau ini harus dilaporkan ke PBB, yaitu ke *United Nations Group of Experts on Geographical Name* (UNGEGN). Ditinjau dari hal tersebut, kegiatan penamaan pulau sebagai bagian dari diplomasi maritim menunjukkan capaian yang positif. Dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan ke-11 *United Nations Conference on Standardization of Geographical Names* (UNCSGN), delegasi Indonesia mendaftarkan 2.590 nama pulau beserta informasinya (koordinat dan lokasi).

⁴ Indonesia meraih 58 suara, sedangkan calon dari negara Asia Pacific lainnya adalah India (120 suara), Thailand (87

suara), Lebanon (60 suara). Hakim dari India dan Thailand mewakili kawasan Asia Pacific untuk panel hakim ITLOS.

(Maritim.go.id, 2017). Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2012 sampai 2019 terjadi tren peningkatan jumlah pulau-pulau yang diberi nama, tahun 2012 tercatat 13.466, tahun 2017 sebanyak 16.065, dan 2019 sebanyak 16.671.(KKP.go.id, 2019).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Melihat 6 dari 7 prioritas diplomasi maritim yang sudah terlaksana, ini merupakan capaian yang signifikan untuk memberikan bukti (1) keberhasilan diplomasi maritim dengan parameter yang ditetapkan dengan jelas; (2) mayoritas dari prioritas sudah tercapai menunjukkan fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius; (3) dengan diagnosis ini, selanjutnya dapat dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia.

Enam capaian prioritas tersebut telah menjadi fondasi dan *benchmarking* untuk diplomasi maritim Indonesia. Tentu saja keenam hal tersebut harus kembali diperkuat dan lingkup capaian serta kualitas capaian harus ditingkatkan dan diperjelas parameternya sehingga di periode kedua Presiden Joko Widodo, fondasi diplomasi maritim Indonesia makin kukuh. Energi dan fokus selanjutnya harus lebih ditekankan pada pencapaian butir 6 dan 7, sehingga secara keseluruhan diplomasi maritim

Indonesia secara adil mencapai keseluruhan program prioritas.

Langkah selanjutnya, pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas dari diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Romantisme prestasi Deklarasi Juanda dan prestasi mencapai rezim negara kepulauan adalah impian dan patokan yang harus didorong terus pada diplomasi maritim Indonesia. Ini memberikan energi untuk mencapai diplomasi maritim.

Khusus penempatan WNI pada organisasi internasional, memang perlu diatur strategi yang tepat dan perencanaan yang tepat. Keanggotaan atas dasar kapasitas Individu lebih sulit dicapai Indonesia karena secara statistik memang tidak banyak WNI yang berkarir di organisasi internasional. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan yang memerlukan SDM ahli di bidang tersebut dan selanjutnya berperan untuk mewarnai di organisasi internasional dan rezim kelautan internasional. Karena itu secara keseluruhan, dukungan pembangunan maritim harus digerakkan di semua lini. Jika telah tercapai tujuan tersebut, diplomasi maritim Indonesia tinggal dipetik dan diarahkan untuk berkompetisi di organisasi internasional.

Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia,

infrastruktur pelabuhan, dan bisnis perkapalan secara umum. Tentu tanpa mengesampingkan terus memperkuat capaian Indonesia, khususnya pada diplomasi pertahanan maritim.

Referensi

- Bisnis.com, *Jokowi Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Maritim Lewat Konsep Indo Pasific*, 15 November 2018.
- D., *Beban Strengthening ASEAN Maritime Forum: A Track One Diplomacy in ASEAN*, Kuliah di Sesparru 59, Jakarta, 10 Juli 2018.
- Data Setditjen Multilateral 2019, Ditjen HPI Kemlu.
- Evan, L., G., Lis dan M., Andrew, *Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi*, CSIS Working Paper Series WPSINT 01/2018.
- Fitriani & C. P., Vido, *Analisis Kinerja Kemlu Indonesia 2015-2018*, CSIS Working Paper Series, WPSINT-3/2019.
- Jakarta Post, *New fisheries centre aims to build presence in Natuna*, 9 Oktober 2019.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penamaan Pulau Pulau Kecil", <www.KKP.go.id>, diakses pada 17 Mei 2019.
- Kompas.com, *Deklarasi Bersama tentang Kerja Sama Maritim RI-Australia ditandatangani 17 Februari 2017*, 16 Maret 2018.
- Kusumastanto, Tridoyo, MS, *Kebijakan Tatakelola Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Governance Policy)*, 2010, Bogor: PKSPL-IPB.
- Laksamana, Evan., Gindarsah, Lis dan Mantong, Andrew., *Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi*, CSIS Working Paper Series WPSINT 01/2018.
- Lampiran Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017, tentang Kerangka Kelembagaan.
- Maritim.go.id, *Pada tahun 2019-2020, Indonesia telah dan akan menghadiri 4 pertemuan UNCLOS tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keberlanjutan*, BBNJ, diunduh 30 Oktober 2019
- , *Indonesia Verifikasi 16.056 Pulau Indonesia*, diunduh 19 Agustus 2017.
- Mauna, Boer., *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
- Republika, "Penamaan Pulau Wewenang Negara," 12 Januari 2017.
- Rijal, Najamudin Khairul, *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia, Global & Strategi*, Tahun 13, No. 1.
- S., Rizal, *Global Maritime Fulcrum in Indonesia's Foreign Policy*, *Distinguished Public Lecture Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*, Singapura, 4 Maret 2015.
- S., Tridoyo K. M., *Kebijakan Tatakelola Kelautan Indonesia*, <[www.https://pkspl.pbc.ac.id](https://pkspl.pbc.ac.id)>, diakses pada 18 Oktober 2019.
- UNCLOS 1982